Pemkot Jakbar Bersama Baznas Bazis DKI Buka Layanan Hapus Tato Selama Ramadan

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Barat bersama Baznas Bazis DKI Jakarta membuka layanan hapus tato di Masjid Assahara Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Layanan tersebut gratis selama bulan suci Ramadan 2023.

Sekretaris Kota Jakarta Barat, Indra Patrianto mengatakan, layanan tersebut begitu dinantikan masyarakat. Sebab, dari total 75 peserta yang terdaftar, hingga Senin (27/3) sudah 60 warga yang datang merapat.

"Program hapus tato ini merupakan kegiatan positif. Kami memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memanfaatkan layanan ini secara gratis," ujar Indra dalam laman resmi Pemprov DKI, Selasa (28/3).

Indra berharap, warga yang telah terdaftar menjadi peserta program hapus tato agar memanfaatkan betul layanan tersebut. Terlebih layanan tersebut gratis tanpa dipungut biaya.

"Warga yang sudah mendaftar menjadi peserta kegiatan ini agar betul-betul memanfaatkan layanan ini. Jangan disia-siakan," imbuhnya.

Indra menambahkan, kegiatan program hapus tato ini merupakan kegiatan yang positif. Sebab, masyarakat bak difasilitasi kembali memurnikan diri melalui penghapusan tato tersebut.

"Sebab dengan dihapusnya tato dari tubuh, warga diberikan kesempatan untuk kembali hijrah menjadi manusia yang lebih baik sehingga selesai bulan Ramadan mereka seperti terlahir kembali dengan tubuh yang bersih," tuturnya.

Di sisi lain, Hamin (61), warga Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, mengaku bersyukur bisa memanfaatkan layanan program hapus tato gratis di Masjid Assahara, Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

"Saya mau menghapus tato yang dibuat tahun 1985. Saya sudah tujuh kali ikut program hapus tato gratis ini. Untuk menghapus tato memang tidak bisa cepat, butuh waktu untuk menghapusnya sampai benar-benar hilang," pungkasnya. ● **yan**

Tertata, 10 Kelurahan di Jaksel Jadi Kawasan Unggulan

JAKARTA (IM) - Sebanyak 10 Kelurahan di Jakarta Selatan menjadi wilayah kawasan unggulan di antara 10 kecamatan dalam penataan kawasan selama Triwulan pertama 2023. Penataan kawasan ini dilakukan, sebagai upaya untuk menghadirkan lebih banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DKI Jakarta.

Adapun 10 kelurahan yang menjadi wilayah unggulan antara lain Kelurahan Cipulir untuk Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Bintaro untuk Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Pulo untuk Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Bangka untuk Kecamatan Mampang Prapatan, dan Kelurahan Kuningan Timur untuk Setiabudi. Kemudian Kelurahan Kalibata untuk Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kebon Baru untuk Kecamatan Tebet, Kelurahan Cilandak Barat untuk Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pasar Minggu untuk Kecamatan Pasar Minggu, dan terakhir Kelurahan Lenteng Agung untuk Kecamatan Jagakarsa.

"Penataan ini sesuai arahan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai upaya penghijauan kawasan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia, khususnya aset milik pemerintah," ungkap Walikota Jakarta Selatan, Munjirin dalam keterangan resmi, kemarin.

Ia menjelaskan, ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memenuhi target ketersediaan RTH sebesar 30% pada 2030. Dalam pelaksanaannya, pengerjaan penataan kawasan dilakukan secara sinergitas dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Suku Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Bina Marga, Pertamanan dan Hutan Kota, serta Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan. ● **yan**

FOTO/ANT

SELEKSI HAKIM AGUNG

Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Triyono Martanto (kiri) menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam seleksi Hakim Agung Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/3). Selain Triyono, ada lima kandidat lainnya yang mengikuti seleksi Hakim Agung, antara lain Annas Mustaqim, Imron Rosyadi, Sukri Sulumin, Lulik Tri Cahyaningrum, dan Lucas Prakoso.

PEMPROV DKI BANYAK ROMBAK PEJABAT

Fraksi PDIP: Kewenangan Pj Gubernur Sama dengan Gubernur Definitif

"Bedanya cuma ketika Pj gubernur melakukan rotasi harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Kalau sewaktu Pak Anies jadi gubernur definitif ya 'hari ini mau merotasi, hari ini bisa dilakukan' tapi kalau sekarang Pj Gubernur mesti meminta persetujuan dari Kemendagri dulu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta banyak melakukan perombakan terhadap para pejabat Pemprov DKI, termasuk sejumlah kepala dinas serta direksi BUMD. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyampaikan perombakan hal yang dengan leluasa bisa dilakukan oleh seorang Pj, bukan hanya bagi gubernur definitif.

"Soal keleluasaan, iya (Pj leluasa melakukan rotasi) karena kewenangannya sama dengan gubernur definitif," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat, Selasa (28/3).

Namun, Gembong menyebut ada perbedaan mengenai kewenangan melakukan perombakan atau rotasi antara Pj gubernur dengan gubernur definitif. Perbedaannya ada pada permintaan persetujuan kepada Pemerintah Pusat.

"Tapi ada bedanya, ketika dia (Pj) melakukan rotasi perlu mendapatkan persetujuan dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Kalau kemarin sewaktu Pak Anies jadi gubernur definitif ya 'hari ini saya mau merotasi, hari ini bisa saya lakukan' tapi kalau sekarang Pj Gubernur mesti meminta persetujuan Kemendagri dulu," tegasnya.

Dengan adanya kewenangan yang sama, Gembong menyebut bahwa perombakan atau rotasi yang dilakukan oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono merupakan hal yang wajar. Hanya saja, dia memberi catatan agar rotasi itu tidak berlandaskan pada aspek like or dislike.

"Iya (wajar), yang penting adalah satu yang harus memenuhi syarat, jangan merotasi hanya karena sentimen. Yang kedua, jangan rotasi karena hanya suka- tidak suka (like or dislike)," jelasnya.

Gembong mengatakan, untuk menghindari kedua hal tersebut, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus mampu memetakan kualifikasi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta yang pas untuk mengisi posisi yang terkena rotasi.

Ditanya lebih lanjut mengenai langkah rotasi yang cukup masif dilakukan oleh Heru Budi, Gembong mengaku belum bisa menyimpulkannya. Pasalnya harus sudah ada penggantinya dahulu agar bisa membandingkan, terutama posisi kepala dinas.

"Ya kita lihat dulu siapa penggantinya, ketika kualitas penggantinya lebih baik, minimal setara ya bisa menipis anggapan itu (adanya sentimen). Tetapi kalau kualitas penggantinya lebih buruk ya orang bisa berasumsi seperti itu," ujarnya.

Diketahui, Heru Budi merotasi sebanyak 20 pejabat eselon II DKI Jakarta dan melantik para penggantinya pada Selasa (21/3) lalu. Di antara para pejabat yang dirotasi adalah beberapa kepala dinas yang lembaganya terbilang strategis, seperti Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti, Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sarjoko, dan Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai pelaksana tugas (Plt) nya. Lalu, ada sedikit 'kejutan' dari digantinya Yani Wahyu Purwoko oleh Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

Uus diketahui sebelumnya pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat (2020-2021) dan dicopot dari jabatannya oleh Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lantas di era Heru Budi kembali menempati jabatan itu.

Kabar perombakan pejabat BUMD juga terdengar santer. Terbaru, Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan yang dikenal kerapkali mengkritik habis-habisan Pemprov DKI Jakarta kini justru menjadi komisaris PT LRT Jakarta. Sementara perombakan direksi di PT Transjakarta dilakukan seiring dengan informasi dirutnya, Kuncoro Wibowo, tersandung kasus dugaan korupsi, padahal memimpin BUMD tersebut baru dua bulan. ● **yan**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT ARTHAVEST Tbk
DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lt.55
Jalan Jend.Sudirman No.86, Jakarta 10220
Telp : +62-21-3111 6101

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2022 , 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021*)	1 Januari 2021/ 31 Desember 2020 *)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	73.775.393.988	74.092.029.437	77.841.604.715
Investasi jangka pendek	10.384.200.000	11.018.790.000	10.268.820.000
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	2.281.374.151	4.703.752.065	2.727.858.515
Piutang lain-lain	77.286.309	1.009.144.358	508.411.730
Persediaan	776.627.952	801.745.444	660.434.325
Pajak dibayar di muka	347.539.723	365.916.017	223.434.233
Biaya dibayar di muka	277.523.498	1.533.542.171	1.024.989.685
Uang muka	226.247.431	88.111.379	476.503.960
Jumlah Aset Lancar	88.146.193.052	93.613.030.871	93.732.057.163
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi saham	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
Aset pajak tangguhan - neto	37.546.945	24.564.258	-
Piutang pihak berelasi	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
Aset tetap - neto	221.490.935.513	235.423.848.770	241.844.455.384
Aset hak-guna - neto	328.752.358	274.895.109	470.697.322
Uang muka pembelian aset tetap	210.772.121	-	6.234.388.402
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.172.397.772	3.521.987.924	2.469.932.528
Aset tidak lancar lain-lain	343.303.464	490.671.193	528.809.398
Jumlah Aset Tidak Lancar	272.583.708.173	288.735.967.254	300.548.283.034
JUMLAH ASET	**360.729.901.225**	**382.348.998.125**	**394.280.340.197**

	31 Desember 2022	31 Desember 2021*)	1 Januari 2021/ 31 Desember 2020 *)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	1.523.230.111	2.236.933.334	2.248.081.855
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	796.429.201	548.521.524	-
Pihak ketiga	36.531.165	644.902.284	533.182.627
Utang pajak	840.349.276	1.170.239.769	1.138.937.644
Pendapatan diterima di muka	1.038.022.603	4.606.837.720	4.747.352.754
Beban masih harus dibayar	1.568.190.392	1.137.864.374	1.167.279.550
Penyisihan untuk penggantian perabot dan perlengkapan hotel serta kesejahteraan karyawan	47.902.460	160.085.234	239.780.544
Liabilitas sewa yang direalisasi dalam satu tahun	104.610.773	192.931.885	229.966.188
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.955.265.981	10.698.316.124	10.304.581.162
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - neto	7.714.654.001	9.161.931.858	8.249.939.365
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	170.667.933	111.655.720	2.077.380.645
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	224.141.583	81.963.220	240.731.135
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.109.463.517	9.355.550.798	10.568.051.145
Jumlah Liabilitas	14.064.729.498	20.053.866.922	20.872.632.307
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 200 per saham			
Modal dasar - 850.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 446.674.175 saham	89.334.835.000	89.334.835.000	89.334.835.000
Tambahan modal disetor - bersih	1.116.892.763	1.116.892.763	1.116.892.763
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
Komponen ekuitas lain			
Penurunan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	(3.393.100.000)	(2.758.510.000)	(3.508.480.000)
Saldo laba			
Belum ditentukan penggunaannya	112.757.638.099	111.286.823.498	113.116.884.599
Telah ditentukan penggunaannya untuk dana cadangan umum	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Sub-jumlah	201.586.265.862	200.750.041.261	201.830.132.362
Kepentingan Non-Pengendali	145.078.905.865	161.545.089.942	171.577.575.528
Jumlah Ekuitas	346.665.171.727	362.295.131.203	373.407.707.890
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**360.729.901.225**	**382.348.998.125**	**394.280.340.197**

*) Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021*)
PENDAPATAN USAHA	**57.846.064.984**	**40.480.469.347**
BEBAN DEPARTEMENTALISASI		
Beban langsung		
Makanan dan minuman	(6.595.755.125)	(3.777.879.587)
Fitness dan spa	(95.331.759)	-
Binatu	(4.166.540)	(2.876.510)
Lain-lain	(4.109.939)	(2.967.608)
Sub-jumlah beban langsung	(6.699.363.363)	(3.783.723.705)
Gaji dan tunjangan	(61.297.895)	(2.311.465.856)
Beban departementalisasi lainnya	(6.512.711.925)	(1.486.921.505)
Jumlah Beban Departementalisasi	(13.273.373.183)	(7.582.111.066)
LABA BRUTO DEPARTEMENTALISASI	**44.572.691.801**	**32.898.358.281**
Beban penjualan dan pemasaran	(201.911.629)	(95.400.053)
Beban umum dan administrasi	(53.828.067.591)	(54.364.821.109)
Pendapatan dividen	4.925.189.787	10.228.513.054
Pendapatan (beban) imbalan kerja karyawan	(67.486.153)	877.896.850
Pendapatan (beban) operasi lainnya - bersih	1.104.896.687	(1.612.655.113)
RUGI USAHA	**(3.494.687.098)**	**(12.068.108.090)**
Pendapatan bunga - bersih	1.768.939.966	2.047.161.986
Beban keuangan	(38.356.828)	(28.750.423)
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**(1.764.103.960)**	**(10.049.696.527)**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak tangguhan	1.462.124.811	(1.319.239.807)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	1.462.124.811	(1.319.239.807)
RUGI TAHUN BERJALAN	**(301.979.149)**	**(11.368.936.334)**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	8.473.940	(925.421.925)
Pajak penghasilan terkait	(1.864.267)	431.811.672
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Kenaikan (penurunan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	(634.590.000)	749.970.000
Laba (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	**(627.980.327)**	**256.359.747**
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(929.959.476)**	**(11.112.576.587)**
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	1.464.204.928	(1.579.192.365)
Kepentingan Non-Pengendali	(1.766.184.077)	(9.789.744.069)
JUMLAH	**(301.979.149)**	**(11.368.936.434)**
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik Entitas Induk	836.224.601	(1.080.091.101)
Kepentingan Non-Pengendali	(1.766.184.077)	(10.032.485.586)
JUMLAH	**(929.959.476)**	**(11.112.576.687)**
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**3**	**(4)**

*) Disajikan kembali

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	56.599.190.815	37.202.964.081
Pembayaran kas kepada pemasok	(48.983.914.112)	(39.937.882.675)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.372.538.434)	(6.903.543.759)
Penerimaan dari pendapatan bunga	1.768.939.966	2.047.161.986
Penerimaan (pembayaran) pajak penghasilan	2.039.940.219	(1.595.046.727)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(38.356.828)	(28.750.423)
Penerimaan dari penghasilan lainnya	4.905.469.901	10.371.864.087
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	14.918.731.527	1.156.766.570
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(1.403.991.174)	(4.343.286.646)
Uang muka pembelian aset tetap	(210.772.121)	-
Penurunan aset tidak lancar lain-lain	122.579.525	-
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.492.183.770)	(4.343.286.646)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran dividen tunai oleh Entitas Anak kepada kepentingan non-pengendali	(14.700.000.000)	-
Pembayaran atas liabilitas sewa	(205.800.000)	(252.000.000)
Kas Bersih yan g Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(14.905.800.000)	(252.000.000)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(1.479.252.243)**	**(3.438.520.076)**
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	**1.162.616.794**	**(311.055.202)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**74.092.029.437**	**77.841.604.715**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**73.775.393.988**	**74.092.029.437**

Catatan :

- Informasi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra *(member of Rödl International GmbH)* yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, pada tanggal 28 Maret 2023.

Jakarta, 29 Maret 2023
S, E & O.
Direksi
PT ARTHAVEST Tbk